

TRADISI ANGGARU TUBARANI GOWA: DARI RITUAL MENJADI PERTUNJUKAN POPULER

TRADITION OF ANGGARU TUBARANI GOWA: (FROM SACRED RITUAL TO BE A POPULAR PERFORMANCE)

Muhammad Fadhly Kurniawan

muhfadhlykurniawan@gmail.com

(Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Universitas Indonesia)

Apriadi Bumbungan

apriadibums@gmail.com, apriadi.bumbungan@ui.ac.id

(Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Universitas Indonesia)

ABSTRACT

In the tradition of the Gowa community, there are two sacred oath traditions, namely Angngaru Tumanurung - the Sombayya (King) pledge to the people - and Angngaru Tubarani - the ritual of oath warriors to Sombayya. However, this article deal specifically of Angngaru Tubarani. The tradition of Angngaru Tubarani (hereinafter read Angngaru) recently is re-interpreted as a form of performance needs. This article tries to see the changing process of the form and meaning of angngaru from ritual to cultural performance commodity. The research is using a cultural ethnographic approach with a direct interview with angngaru practitioners and a literature review. This article sees that the changing meaning of Angngaru cannot separate from social and economic changes toward Gowa-Makassar society. The social changing as globalization effect and the development needs of tourism economics are a determinant of the rising of new cultural interpretation. . Angngaru, which previously interpreted as a sacred ritual, has become a cultural commodity that is mass-consumed nowadays. . The research found that the commodification of the Angngaru tradition into popular performance culture can be interpreted as a strategy to maintain or keep the tradition continues to exist today. This research shows the meaning creation of the oral tradition of angngaru for more complex social needs. .

Keywords: Angngaru Tubarani, Comodification, Performance, Ritual, Oral Tradition

ABSTRAK

Dalam tradisi masyarakat Gowa, terdapat dua tradisi sumpah sakral, yaitu *Angngaru Tumanurung*—ikrar *Sombayya* (raja) kepada rakyat—dan *angngaru tubarani*—ritual sumpah prajurit kepada *Sombayya*. Artikel ini membahas secara khusus mengenai *Angngaru Tubarani*. Tradisi *Angngaru Tubarani* (selanjutnya baca *angngaru*) dewasa ini dimaknai ulang sebagai bentuk kebutuhan pertunjukan. Artikel ini berusaha melihat proses perubahan bentuk dan makna *angngaru* dari ritual menjadi komoditas pertunjukan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi budaya dengan metode wawancara langsung dengan praktisi *angngaru* dan studi kepustakaan. Artikel ini melihat bahwa perubahan makna *angngaru* tidak terlepas dari perubahan-perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Makassar. Perubahan sosial sebagai efek globalisasi dan kebutuhan pengembangan ekonomi wisata menjadi determinan munculnya tafsir budaya baru. *Angngaru* yang dulunya dimaknai sebagai suatu ritual yang sakral, kini telah menjadi suatu komoditas budaya yang dikonsumsi secara massal. Penelitian ini menemukan bahwa komodifikasi tradisi *angngaru* ke dalam budaya pertunjukan populer dimaknai sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan ataupun menjaga tradisi tersebut tetap eksis di masa sekarang. Penelitian mengenai tradisi *angngaru* ini memperlihatkan penciptaan makna tradisi lisan *angngaru* untuk kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks.

Keyword: *Angngaru, Tubarani, Komodifikasi, Pertunjukan, Ritual, Tradisi Lisan*

PENDAHULUAN

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya banyak terikat dengan peristiwa saling sumpah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa perjanjian yang isinya berupa sumpah-sumpah antarkerajaan yang telah

tercatat dalam *lontara* baik kerajaan-kerajaan Bugis maupun kerajaan-kerajaan Makassar. Salah satu contohnya adalah perjanjian *Tellumpoccoe* yang mengikat tiga kerajaan besar Bugis—Bone, Soppeng, dan Wajo; perjanjian *Dua Cappagala* antarkerajaan Gowa-Luwu; perjanjian *Lima Ajatapparang*

yang terdiri atas lima kerajaan di sebelah barat Danau Sidenreng. (Hamid et al. 1992:113–14).

Tradisi dalam konteks masyarakat Makassar, terdapat satu peristiwa tradisi sumpah yang masih dapat dijumpai dan telah dikemas menjadi suatu bentuk kesenian dan pertunjukan. Tradisi sumpah tersebut secara umum dikenal dengan sebutan *angngaru*. Pada dasarnya suku Makassar—wilayah administrasi yang bermukim di pesisir selatan Pulau Sulawesi yang terdiri atas Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, dan Kajang (sub-etnik)—memiliki *angngaru* masing-masing. Hal ini didasarkan pada kerajaan-kerajaan yang pernah bermukim di daerah tersebut. Terdapat sebuah fakta selama penelusuran di lapangan, yaitu *angngaru* kerajaan tersebut ternyata tidak lagi menjadi slogan kerajaannya, tetapi telah beralih menjadi *angngaru* berdasarkan nama kabupaten atau distrik asalnya.

Sebelum jauh membahas mengenai *angngaru*, perlu diketahui bahwa Kerajaan Gowa terikat dengan narasi tentang sebuah peristiwa mitologi kedatangan seseorang putri dari alam atas (kayangan). Kisah tersebut secara garis besar menceritakan bagaimana proses pengangkatan Raja Gowa yang pertama. Dalam peristiwa tersebut, dilakukan sebuah ritual sumpah atau kontrak politik—antara raja dan rakyat yang diwakili oleh *Kasuwiyang Salapang* (Abdullah. 1985). *Kasuwiyang Salapang* merupakan kumpulan sembilan pengabdian Kerajaan Gowa, hal ini dapat diartikan sebagai sembilan negeri yang merupakan federasi kecil yang membentuk Kerajaan Gowa. Sayangnya tidak ada istilah yang digunakan untuk penamaan peristiwa sumpah/ikrar tersebut. Oleh karena itu pada tulisan ini disebutlah peristiwa itu dengan istilah *Angngaru Tomanurung* yang berarti ikrar raja kepada rakyatnya.

Angngaru Tomanurung merupakan cikal bakal terjadinya tradisi *Angngaru Tubarani*. Hal tersebut dapat disaksikan dari formula syair yang terdapat pada kedua peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengelaborasi beberapa permasalahan menyoal tradisi, yakni; bentuk dan fungsi, aspek kesejarahan, dan perubahan makna tradisi *angngaru* dalam masyarakat Gowa-Makassar dari masa ke masa. Penelitian ini

bertujuan mendudukan tradisi sebagai salah satu medium dalam melihat sambung-kait antara kebudayaan dan perubahan struktur pranata masyarakat (politik, ekonomi, dan sosial,) dari tingkat regional sampai global. Adapun manfaat penelitian ini, yakni sebagai langkah awal dalam mendata tradisi-tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi serta preservasi nilai-nilai tradisi lisan masyarakat Gowa-Makassar.

METODE

Berdasarkan pengamatan beberapa sumber referensi, diungkapkan bahwa penelitian terhadap kajian tradisi lisan cenderung menggunakan metode etnografi. Spradley (1997:3) menjelaskan bahwa etnografis merupakan suatu pendeskripsian suatu aktivitas kebudayaan yang bertujuan agar memahami suatu pandangan hidup dari perspektif penduduk asli. Hal ini melibatkan kegiatan belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berfikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, etnografi adalah sebuah proses pembelajaran dari suatu masyarakat. Singkatnya, penelitian etnografis memudahkan peneliti dalam memahami sistem dan kognisi suatu masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan pasif, aktif, dan wawancara (Spradley 1997). Pengamatan pasif merupakan suatu pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat pendukung suatu tradisi dan pengamatan pada saat berlangsungnya pertunjukan yang mencakup kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Syahrial 2016:67). Selanjutnya pengamatan aktif menurut Murgiyanto (2004:121) adalah terlibatnya seorang peneliti secara aktif dalam proses latihan dan pertunjukan. Dalam penelitian korpus ini peneliti dituntut aktif dalam segala proses persiapan sebelum dan sesudah pertunjukan *Angngaru Tubarani* dilaksanakan. Yang terakhir adalah pengamatan dengan wawancara. Wawancara diperlukan guna melengkapi dan memperdalam data dari kedua teknik yang dilakukan sebelumnya. *Output* yang dihasilkan melalui teknik wawancara,

yaitu data yang terhimpun bersifat holistik dan saling melengkapi (Syahrial 2016:69).

Agar penelitian terdokumentasi dengan baik, penelitian ini didukung dengan beberapa gawai seperti HP, kamera, dan alat bantu rekam lainnya. Hal ini bertujuan agar segala peristiwa yang telah disaksikan selanjutnya difiksasi ke dalam sebuah metadata. Dengan dibekukannya sebuah peristiwa dengan peranti tersebut, penelitian akan dimudahkan dalam mengolah data audio-visual ke depannya.

PEMBAHASAN

Angngaru Tomanurung

Raja Gowa yang pertama menurut mitologi adalah seorang putri yang turun dari dunia atas yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian antarbeberapa federasi yang saling bertikai. Basang (1997:50) mengatakan bahwa berdirinya Kerajaan Gowa dilandasi dengan sebuah peristiwa perjanjian (ikrar) antara raja dengan beberapa federasi yang dinamakan *Kasuwiyang Salapang*.

Substansi dalam perjanjian ikrar tersebut terkandung batas-batas kekuasaan dan kewenangan antara raja dengan *Kasuwiyang Salapang* yang mewakili rakyat di daerahnya. Perjanjian tersebut dinamai dengan *Angngaru Tomanurung*. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, *Angngaru Tomanurung* dalam hal ini berkekuatan sebagai undang-undang atau peraturan yang harus ditaati kedua pihak demi terwujudnya penyelenggaraan yang demokratis.

Peristiwa tersebut menurut Paeni (2002:38) merupakan bentuk relasi patron dan klien. Hubungan yang didasarkan atas kesadaran bahwa suatu hubungan kekuasaan dari seorang yang lebih tinggi terhadap bawahan dan juga disadari bahwa atasan (dalam hal ini raja) sebagai patron, dan bawahan (rakyat yang telah berikrar) sebagai klien saling membutuhkan. Dalam hal ini tercermin atau tergambar konsep kepemimpinan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada waktu itu yang diperkirakan terjadi sekitar akhir abad ke 13 (Sikki and Nasruddin. 1995).

Berdasarkan catatan sejarah, *Angngaru Tomanurung* merupakan tradisi lisan tertua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan

Gowa tradisi tertua relasi antara raja dan rakyat Gowa. Hal tersebut dilandaskan dengan adanya bentuk kontrak politik yang secara eksplisit menurut Mattulada sebagai *governmental contract* (kontrak politik) antara *Kasuwiyang Salapang* dengan *Tomanurung*. Pernyataan tersebut diambil berdasarkan teori yang dikemukakan Catlin dalam bukunya yang berjudul *A History of the Political Philosophy* (Abdullah, 1985), yaitu tentang dasar-dasar dan janji yang lahir dari masyarakat dan kemudian berkembang di Eropa menjadi sebuah sistem.

Abdullah (1985:84), peristiwa *Angngaru Tomanurung* tidak hanya dalam batasan *governmental contract* tetapi lebih dari itu, sebuah bentuk *social contract* dengan manusia yang tergolong dari kelompok penguasa dan dari kelompok rakyat yang dipimpin oleh raja. Masing-masing kelompok tersebut mengikatkan diri dalam suatu penjanjian sosial (abstrak) untuk bersama-sama membangun masyarakat atau negara yang bertujuan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan hidup di dunia.

Tradisi *Angngaru Tomanurung* juga dapat dijumpai di Kerajaan Bone. *Angngaru Tomanurung* di Bone ini juga berasal dari konsep mitologi *Tomanurung*. Ritual ini biasanya disaksikan oleh dewan adat yang berikrar di hadapan *Tomanurung Mata SilompoE* (Mattulada. 1985). Secara konseptual keduanya memiliki persamaan. Perbedaan tradisi *Angngaru Tomanurung* Gowa dan Bone terletak pada tatanan bahasa yang digunakan, sedangkan formula syair ikrarnya memiliki pola yang hampir sama. Selanjutnya akan dibahas mengenai peristiwa yang bertalian dengan *Angngaru Tomanurung*, yaitu *Angngaru Tubarani* yang bermakna sumpah/ikrar kesetiaan panglima perang kepada *sombayya*.

Angngaru Tubarani

Cummings (2015:58) menyatakan bahwa *Angngaru Tubarani* juga dimaknai sebagai peristiwa sumpah kesetiaan prajurit terhadap rajanya, Tradisi ini dilakukan saat hendak berangkat ke medan laga (perang). Lebih lanjut Cummings mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *Angngaru Tubarani*, prajurit atau panglima perang mengucapkan syair-syair

Angngaru Tubarani dihadapan *sombayya* (raja) sembari menghunuskan pedangnya, dengan suara yang lantang disertai ekspresi emosional yang ditunjukkan oleh *pangngaru* (pelaku *angngaru*). Ritual tersebut membentuk simulasi medan perang. Hal demikian menjadikan orang yang turut menyaksikan ritual ini seakan-akan terbawa/turut merasakan kesakralan dan kejamnya di medan laga.

Tradisi *Angngaru Tubarani* merupakan salah satu tradisi yang telah lama ada dalam tubuh masyarakat Makassar. Dalam catatan sejarah, *Angngaru Tubarani* disebut juga sebagai salah satu tradisi tertua di Kerajaan Gowa. Hal tersebut dapat dikatakan valid karena *Angngaru Tubarani* merupakan suatu fenomena sosial-budaya (ikrar) yang biasanya ditampilkan dalam pelantikan raja, sumpah sebelum menuju medan perang, dan beberapa agenda sakral terkait kegiatan dalam lingkungan Kerajaan Gowa. Adapun sebagai sebuah sumpah, *Angngaru Tubarani* sarat mengandung nilai-nilai masyarakat Makassar, utamanya kesetiaan *ata'* (bawahan) terhadap *karaeng* (raja atau bangsawan). Dalam konteks masyarakat modern nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut tetap terjaga namun dalam bentuk yang lebih transformatif dari sebelumnya, yakni budaya pertunjukan.

Pembahasan kali ini akan difokuskan pada tradisi *Angngaru Tubarani* di Kerajaan Gowa. Elaborasi terhadap tradisi *Angngaru Tubarani* Gowa yang penulis maksudkan bertujuan untuk menelisik perubahan yang terjadi pada tradisi ini, dari konteks zaman kerajaan ke masa modern saat ini. Perubahan tersebut dilihat dari bentuk tradisi *Angngaru Tubarani* yang mengalami pergeseran yang pada mulanya merupakan sebuah upacara sakral menjadi sebuah komoditi pertunjukan di masa sekarang. Adapun perubahan fungsi tradisi *Angngaru Tubarani* dari sesuatu yang sakral menjadi pertunjukan profan tersebut tidak dapat disimplifikasi sebagai suatu bentuk komodifikasi budaya (*cultural commodification*) dalam arti negatif. Komodifikasi budaya tradisi *Angngaru Tubarani* dalam tulisan ini dilihat sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan dan mewariskan suatu tradisi yang bisa jadi akan tergerus dan hilang apabila tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri.

Angngaru Tubarani sebagai Ritual Sumpah Setia Prajurit Gowa

Peristiwa *Angngaru Tumanurung* dan *Angngaru Tubarani* memiliki esensi yang sama, yaitu sebuah peristiwa sumpah. *Angngaru* menurut Latief (2000) merupakan suatu peristiwa bersumpah yang dilakukan oleh seorang pria yang sambil memegang keris atau senjata lainnya dan umumnya bersumpah dihadapan orang banyak atau raja. *Angngaru* dilaksanakan pada upacara pelantikan raja, peperangan, perkawinan raja, atau upacara kerajaan lainnya. Menurut KBBI (edisi ke V), *angngaru* berasal dari kata *aruk* yang berarti suatu tarian yang menggunakan keris di tangan seolah-olah menyerang musuh sebagai tanda setia kepada raja.

Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu praktisi *angngaru* sekaligus budayawan Kabupaten Gowa, Syarifuddin Dg. Tutu (2019) *angngaru* menurutnya berasal dari bahasa Makassar (tinggi) yang artinya sumpah atau ikrar. Dg. Tutu menyebutkan bahwa *angngaru* merupakan suatu bentuk ikrar kesetiaan terhadap Raja Gowa yang sifatnya sangat sakral. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang disaksikan oleh *Tomanurung Baineya* seorang putri yang turun dari kayangan saat diangkat menjadi Raja Gowa yang pertama oleh ke sembilan federasi kerajaan atau yang disebut dengan *Kasuwiayang Salapang*. Tradisi *Angngaru* dapat dikatakan sebagai salah satu ritual tertua dalam lingkungan Kerajaan Gowa. Hal tersebut mendapat signifikansi dari Hamid Abdullah (1985) yang mengatakan bahwa tradisi *angngaru* merupakan tradisi tertua yang ada di Kerajaan Gowa karena disaksikan langsung oleh *Tomanurung Baineya*.

Menurut etimologi kata *angngaru* berasal dari kata dasar *aru* yang berarti sumpah, diberi prefiks *a'/ang* sebagai bentuk kata kerja yang bermakna bersumpah. *Angngaru* sendiri adalah ikrar yang diucapkan masyarakat Gowa pada jaman dahulu di wilayah sembilan negeri federasi (*gallarrang*) yang membentuk wilayah Kerajaan Gowa. Dalam hal lain, *aru* yang diucapkan oleh prajurit disebut "Aru Tubarani" (sumpah pemberani). Secara konvensional, tradisi *angngaru* dikenal sebagai suatu peristiwa sosial-budaya yang berada dalam masyarakat suku Makassar khususnya daerah

Kabupaten Gowa. Berdasarkan catatan sejarah, *angngaru* dahulunya hanya dilakukan dalam lingkungan Kerajaan Gowa mengingat tradisi tersebut merupakan ikrar yang hanya diperuntukkan bagi raja-raja baru yang akan dilantik.

Angngaru Tubarani dapat pula dimaknai sebagai tradisi yang mengandung nilai kepemimpinan di dalamnya. Apabila raja telah menerima sumpah dari prajurit, raja seyogianya juga harus menjamin kehidupan rakyat yang telah berjanji setia kepadanya. Dimensi mutualisme dalam tradisi *angngaru* menjadi poin penting dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Gowa di waktu lampau. Hal tersebut juga menjadi titik perhatian penulis dalam artikel ini. Menurut penulis, *Angngaru Tubarani* Gowa merupakan bagian penting yang membangun struktur hierarkis masyarakat feodal Gowa. Tradisi *angngaru* dapat dikatakan sebagai determinan yang membuat Kerajaan Gowa pada masanya termahsyur hingga ke luar negeri. Hal tersebut tentu saja tidak berlebihan mengingat dalam sejarah Kerajaan Gowa, prajurit-prajurit dari kerajaan ini dikenal sebagai prajurit yang pemberani dan memiliki militansi yang tinggi.

Kesejarahan Angngaru Gowa dan Implementasi Nilai Kesetiaan

Paparan sebelumnya telah dijelaskan mengenai *Angngaru Tomanurung* yang merupakan tonggak awal dari kesejarahan kerajaan terbesar di Indonesia Timur, yaitu Kerajaan Gowa (Massiara. 1988). Bermula dari *lontara* yang menyatakan bahwa pada masa sebelum kedatangan *Tomanurung*, kondisi masyarakat dalam keadaan kacau-balau. Istilah tersebut awam diketahui sebagai *sikanre juku*. Menurut Abdul Razak Daeng Patunru (1972), di pusat Kerajaan Gowa pada masa itu—sebelum datangnya *Tomanurung*—terdapat sembilan kerajaan kecil (*gallarrang*) yang membentuk federasi yang diketuai oleh seorang pemimpin, *paccallaya*. Namun *paccallaya* tidak berfungsi sebagai seorang raja, jabatannya sebagai ketua federasi hanya sebatas lambang yang tidak memiliki pengaruh kekuasaan langsung terhadap tiap-tiap daerah yang bergabung dalam federasi. Tiap-tiap anggota federasi mempunyai hak otonom yang bebas untuk berbuat sekehendak hatinya

sehingga federasi sembilan kerajaan tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Melihat kondisi federasi yang tidak stabil, tidak mengherankan jika konflik dan ketegangan rawan terjadi di antara mereka.

Kondisi carut-marut dan perang antarfederasi terus terjadi, peran *paccallaya* sebagai ketua tidak dapat diharapkan dan tidak mempunyai wibawa dalam memimpin. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesembilan federasi lainnya tidak dapat mencari pemimpin yang dapat digugui di antara mereka. Sampai pada puncak konflik, terdengar berita oleh *paccallaya* bahwa di satu tempat yang bernama puncak *Takabassia* telah turun dari kayangan seorang puteri. Setelah *paccallaya* memastikan kebenaran dari berita tersebut, diadakanlah *Empo Sipangatarri* atau perundingan antara sembilan federasi tersebut. Di antaranya, yaitu berasal dari daerah Tombolo, Lakiung, Saumata, Agangje'ne, Parang-Parang, Data, Bisei, Kalling, dan Sero. Setelah perundingan selesai dilaksanakan, para anggota federasi yang dipimpin oleh *paccallaya* menemui sosok putri yang turun dari kayangan. Adapun hasil dari perundingan antarfederasi tersebut adalah mengangkat putri kayangan untuk menjadi pemimpin/raja bagi kesembilan kerajaan tersebut.

Para rombongan penguasa lokal yang dipimpin oleh *paccallaya* bertemu dengan tuan putri. Pada pertemuan tersebut, diutarakanlah maksud kedatangan mereka dalam sebuah dialog;

Berkata paccallaya:

“Kami semua datang kemari untuk ambil engkau menjadi raja kami”.

Tomanurung menjawab:

“Engkau pertuan kami, masih menumbuk masih mengambil air.

(Maksudnya: engkau meminta saya menjadi rajamu, tapi engkau masih mewajibkan saya menumbuk padi dan mengambil air).

Berkata paccallaya:

“Sedangkan istri kami tidak menumbuk, tidak mengambil air, apalagi engkau yang kami pertuan (raja)”.

Dialog di atas menurut Dg. Patunru (1972) merupakan percakapan antara pemimpin federasi dengan putri kayangan (*Tomanurung*) yang menjadi awal terbentuknya Kerajaan Gowa. Beberapa waktu kemudian *Tomanurung* menikah dengan manusia biasa yang disebutkan pria tersebut berasal dari arah selatan—sebagian sejarawan menyebutnya dari Bantaeng—yang bernama Karaeng Bayo. Setelah pernikahan *Tomanurung*, federasi mengadakan pertemuan dengan seluruh rakyat Gowa disaksikan oleh *Kasuwiyang Salapang*. *Kasuwiyang Salapang* merupakan sembilan pengabdian yang bertugas sebagai dewan penasihat dan pelaksana dalam sistem pemerintahan federasi Gowa. Pertemuan tersebut berisi dialog antara Karaeng Bayo dan rakyat Sembilan federasi yang pada bagiannya melahirkan lirik sumpah yang disebut *angngaru*. Adapun dialognya berbunyi demikian:

Berkata Karaeng Bayo (Suami *Tomanurung*-manusia biasa):

“Bahwasanya engkau telah mengangkat kami sebagai rajamu, kami bersabda dan engkau tunduk patuh, kami adalah angin dan engkau adalah daun kayu. (Maksudnya: Oleh karena engkau telah mengangkat kami menjadi rajamu maka segala titah kami harus engkau junjung dan segala kehendak dan perintah kami engkau harus laksanakan).

Paccallaya bersama *Kasuwiyang Salapanga* menjawab (mereka menjawab secara bergilir):

Bahwasanya kami telah mengangkat engkau menjadi raja kami, engkau adalah raja dan kami adalah hamba rakyat tuanku.

Engkau adalah sangkutan tempat bergantung, kami adalah *Lau* (semacam labu tempat air atau tuak). **Maksudnya:** Raja adalah tempat rakyat berlindung.

Kalau sangkutan tempat bergantung patah dan *Lau* tidak pecah, maka kami patah. **Maksudnya:** Bilamana kami patik sekalian tidak menepati janji kepada tuanku, maka patik sekalian akan binasa.

Kami tidak akan tertikam oleh senjatamu, engkau pun tidak akan tertikam oleh senjata kami.

Maksudnya: Tuanku tidak akan membunuh patik sekalian dan patik pun tidak akan membunuh tuanku.

Hanya dewata yang membunuh kami, engkau pun hanya dewata yang membunuhmu. **Maksudnya:** Raja dan *Kasuwiyang Salapanga* harus saling berserah diri kepada dewata.

Bertitahlah engkau dan kami tunduk patuh. Kalau kami menjunjung maka kami tidak memikul; kalau kami memikul maka kami tidak menjunjung. **Maksudnya:** Segala titah raja, kami junjung tinggi, tetapi jika perintah tuanku tidak adil maka perintah itu tidak dilaksanakan oleh *Kasuwiyang Salapanga*.

Engkau adalah angin, kami adalah daun kayu yang telah menguning saja engkau turunkan.

Maksudnya: Raja tidak boleh berbuat sesukanya saja terhadap *Kasuwiyang Salapanga* dan rakyat tetapi yang bersalah saja yang dihukum.

Engkau adalah air dan kami hanyalah batang hanyut, akan tetapi hanya air pasang yang besar saja yang dapat menghanyutkannya. **Maksudnya:** Raja berkuasa dalam batas-batas yang patut terhadap rakyat, akan tetapi di dalam hal-hal yang sangat penting, umpamanya negeri berada di dalam bahaya perang, maka adalah kewajiban rakyat untuk membela negerinya.

Walaupun anak kami, walaupun istri kami, tetapi jika kerajaan tidak menyukainya, maka kami pun tidak menyukainya.

Maksudnya: Walaupun istri dan anak kami bersalah, kami merelakan mereka dikenakan hukuman atas kesalahannya.

Bahwasanya kami mempertuan engkau, hanya diri pribadi kamilah mempertuan engkau, bukanlah harta benda kami.

Engkau tidak akan mengambil ayam dari kandang kami, engkau tidak akan mengambil telur di pekarangan kami, tidak mengambil kelapa kami sebutir pun dan tidak mengambil pinang setandan pun dari kami.

Jika engkau mengingini barang kepunyaan kami, engkau membelinya yang patut dibeli, engkau menggantinya yang patut diganti, engkau memintanya yang patut diminta dan kami akan memberikannya pada engkau, engkau tidak boleh terus mengambil begitu saja milik kami.

Raja tidak memutuskan hal ihwal di dalam negeri jika gallarrang tidak hadir dan gallarrang tidak akan mengambil keputusan tentang soal perang, jika raja tidak hadir. (Patunru 1972:1–6).

Beberapa kutipan dialog di atas berisi lirik *angngaru* menyoal kesetiaan rakyat kepada pemimpin dan tugas raja sebagai pengayom masyarakat. Setelah dialog berisi ikrar yang disaksikan oleh *Tomanurung*, *Karaeng Bayo*, dan *Kasuwiayang Salapang* terjadi, kontrak politik tersebut berisi harapan agar kehidupan dalam bermasyarakat (dalam konteks Kerajaan Gowa) dapat berjalan dengan harmonis. Dari kutipan dialog tersebut, dapat dilihat makna yang hadir mengenai pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok atau negeri. Ikrar yang disebutkan dalam pengandaian tersebut sarat akan nilai kesetiaan dan pengabdian masyarakat Makassar atau Gowa dalam kehidupan sehari-harinya.



Gambar 1. Dg. Tutu (praktisi) sedang melakukan *angngaru* pada kegiatan kebudayaan di Kab. Gowa
Sumber: Koleksi pribadi Dg. Tutu

Konsep kesetiaan yang dimaksudkan dalam lirik *angngaru* dapat merefleksikan tata nilai dalam masyarakat Gowa di masa lampau. Dalam studi tentang memori, tradisi lisan *angngaru* dapat dikatakan sebagai sebuah penggambaran proses penciptaan makna yang

berisi eksistensi peradaban masyarakat madani (Abrams 2016). Dalam perkataan lain, tradisi lisan *angngaru* memberikan visualisasi hubungan simbiosis mutualisme antara rakyat dan pemimpin yang disatukan dalam ikatan sakral ikrar kesetiaan. Dengan demikian, hal tersebut secara gamblang melukiskan hubungan atau memori kolektif dari masyarakat Makassar di masa lampau yang sampai saat ini masih dapat ditemui secara langsung.

Adapun hal lain yang dapat dilihat dari tradisi *angngaru* Gowa merujuk pada struktur hierarkis masyarakat feodal kerajaan di masa lampau. Dalam lirik *angngaru*, *Ata'* atau rakyat yang melakukan sumpah kepada *karaeng* atau raja menyerahkan kehidupan dan pengabdiannya kepada tanah/negeri. Dari hal tersebut, budaya dalam masyarakat feodal kerajaan dinarasikan sebagai sesuatu yang saling 'menghidupkan'. Dalam konsepsi masyarakat Makassar, terdapat nilai '*sipakatuo*' (saling menghidupkan) dan '*sipakatau*' (saling memanusikan) yang secara tidak langsung juga terkandung dalam tradisi lisan *angngaru*. Di satu sisi, *ata'* memercayakan kehidupannya kepada *karaeng* dalam bentuk kesetiaan kepada kerajaan. Di sisi lain, *karaeng* secara etik harus pula mensejahterakan golongan *ata'* yang telah bersumpah menjamin keselamatan raja dan negeri. Dengan demikian, nilai-nilai hubungan mutual dalam tradisi lisan *angngaru* menunjukkan urgensinya dalam kehidupan kebudayaan feodal Kerajaan Gowa di waktu lampau.

Terbentuknya Kerajaan Gowa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tradisi *angngaru* dalam kesejarahannya. Sebagaimana penjelasan di atas, tradisi *angngaru* menjadi bagian penting dalam proses pembentukan Kerajaan Gowa dan sistem hierarkisnya. Kisah mengenai "Sembilan Gallarang dan Tomanurung Putri" menjadi fiksasi monumental yang menjadikan *angngaru* sebagai bagian dari tradisi yang lekat dengan masyarakat dan kerajaan tersebut. Dengan demikian tradisi *angngaru* dalam konteks ritual berkelindan dengan proses pembentukan struktur feodal Kerajaan Gowa yang berisi memori tentang hubungan mutualisme rakyat dan pemimpin

serta nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Gowa-Makassar secara umum.

Perubahan Fungsi Tradisi *Angngaru* hingga Pertunjukan Populer

Dewasa ini *angngaru* dalam masyarakat Gowa telah dikemas menjadi suatu konsep kesatuan pertunjukan yang terdiri atas 4-5 orang, yakni; *Pangngaru* (penutur), dua orang pemain gendang Makassar, satu orang bermain *puik-puik* (sejenis alat musik tiup), dan satu orang lagi bermain gong. *Angngaru* sering dipertunjukkan baik dalam kegiatan adat, kegiatan pemerintahan, maupun dalam penyambutan tamu–tamu kehormatan. Bahkan dalam upacara pernikahan *angngaru* juga sering ditampilkan. Hal ini menunjukkan pergeseran fungsi ritual yang bila dimaknai, *angngaru* (pertunjukan) menyampaikan simbol untuk tamu yang berkunjung akan mendapatkan legitimasi hukum. Artinya, mereka akan dijamin keselamatan dan kenyamanannya selama berada di daerah yang dikunjunginya, khususnya dalam wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Perubahan tradisi *angngaru* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan pranata sosial, budaya, dan politik masyarakat Gowa-Makassar dari masa ke masa. Pada masa Kerajaan Gowa-Makassar mula-mula, bentuk dan fungsi dari tradisi *Angngaru Tubarani* masih berupa ritual yang sakral. Struktur sosial dan budaya yang masih menganut sistem feodal memungkinkan tradisi tersebut diposisikan sebagai sebuah ritual yang sakral. Terlebih pada masa tersebut gejolak politik dan pemerintahan mendukung *angngaru* menjadi sebuah kebutuhan ritual. Hal tersebut ditengarai gejolak pemerintahan dan politik zaman kerajaan yang masih tinggi, sehingga pengkultusan tradisi tersebut dimungkinkan sebagai bagian dari praktik menjaga semangat dan kesetiaan prajurit kerajaan terhadap Raja selaku kepala pemerintahan. Dengan kata lain, *Angngaru Tubarani* pada masa Kerajaan Gowa-Makassar mula-mula adalah bagian dari praktik ideologis untuk menjaga status quo kekuasaan.

Ritual *angngaru* kemudian mengalami perubahan bentuk dan fungsinya ketika memasuki masa Indonesia berdiri menjadi

sebuah negara (*state*). Leburnya kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi Indonesia dalam konteks *nation-state* mengikis makna ritual pada tradisi sejenis *angngaru* menjadi sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pertunjukan populer. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem sosial-politik-budaya yang feodal menjadi liberal-demokratis, khususnya dalam konteks masyarakat Gowa-Makassar. Dalam masa pemerintahan modern, kepentingan untuk memajukan pembangunan dan ekonomi Negara—salah satunya melalui pranata *tourisme*—juga sedikit banyak memengaruhi bergesernya bentuk dan fungsi tradisi *Angngaru Tubarani*. Ritual yang pada mulanya hanya dipraktikkan dalam ruang medan peperangan, berganti menjadi pertunjukan massa yang ditampilkan dalam setiap agenda pemerintahan dan kegiatan kepariwisataan. Bergesernya bentuk dan fungsi tradisi *angngaru* yang dipaparkan di atas, selanjutnya akan memengaruhi pemaknaan terhadap tradisi tersebut dalam era kontemporer dewasa ini.

Perubahan fungsi *angngaru* dari ritual ke dalam pertunjukan populer menunjukkan suatu ‘penghadiran masa lalu’ yang diejawantahkan dalam struktur estetika baru melalui pembacaan aktual masa kini (Cummings. 2015). Dalam arti lain, perubahan ritual *angngaru* menjadi sebuah seni pertunjukan tidak dapat semata-mata disebut sebagai sebuah komodifikasi yang janggal. Perubahan tersebut menurut Hobsbawn (2019) harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melestarikan dan menghadirkan kembali nilai-nilai tradisi lisan *angngaru* ke dalam kehidupan modern. Adapun perdebatan menyoal bentuk dan struktur *angngaru* yang mengalami perubahan signifikan dalam seni pertunjukan, seyogianya menjadi hal yang justru akan menghidupkan tradisi tersebut di kalangan pemerhati dan praktisi tradisi lisan. Pergeseran nilai dalam perubahan fungsi tradisi merupakan hal yang niscaya, namun lebih dari itu, ingatan dan nostalgia terhadap kesetiaan prajurit Kerajaan Gowa pada masa lampau masih dapat dijumpai oleh generasi masa kini dalam bentuk tradisi yang lebih dinamis dan adaptif.

Menurut Bauman (1977) pertunjukan merupakan sebuah penanda yang memperkuat penyampaian makna (komunikasi) dan

dibingkai secara khusus melalui penampilan kepada sejumlah penonton. Dengan demikian pertunjukan memuat unsur-unsur kesenian verbal termasuk narasi sejarah dari tradisi. Dalam konteks *angngaru* sebagai sebuah pertunjukan populer, narasi dari tradisi tersebut ‘menstruktur’ dalam unsur-unsur yang membangun pertunjukan. Kehadiran aktor *pangngaru*, *paganrang*, dan tamu kehormatan merupakan bagian yang membangun tradisi tersebut dalam bentuknya yang lebih transformatif. Adapun isi dari ikrar *angngaru* yang ditampilkan dalam bentuk pertunjukan tradisi tidak banyak berubah, dan secara substantif tidak banyak mengubah makna atau pesan dari *aru* yang dikumandangkan.

Bentuk pertunjukan tradisi *angngaru* di masa sekarang mengalami pergeseran pada ranah fungsi ritualitasnya. *angngaru* tidak lagi dimaknai sebagai bentuk ritual sakral—raja yang bersumpah di hadapan rakyat maupun prajurit yang akan membela raja dan tanah airnya, tetapi dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan dan jaminan kultural (keamanan) terhadap tamu yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Gowa. Berdasarkan argumen tersebut, perubahan fungsi *angngaru* dari sebuah ritual sakral menjadi budaya pertunjukan populer hanya terjadi pada tatanan struktur dan sifatnya.

Subtansi *aru* yang termuat dalam lirik *angngaru* seyogianya tidak banyak bergeser. Dalam pengertian penulis pada artikel ini, hal tersebut dianggap sebagai komodifikasi ritual (*cultural commodification*) yang memiliki fungsi konservasi tradisi. Pewarisan dan pemertahanan tradisi dalam bentuk komodifikasi budaya tersebut, baiknya dilihat sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai pengetahuan lokal-tradisional yang dapat secara adaptif melewati gerusan perubahan zaman dan nilai dalam masyarakat modern.

Hadirnya teknologi digital sebagai dampak langsung dari globalisasi menuntut secara radikal model penyesuaian diri tradisi-tradisi lisan seperti *angngaru* agar dapat ‘bersahabat’ dengan kondisi masyarakat modern. *angngaru* dalam bentuk pertunjukan dimaknai sebagai bagian dari proses kebudayaan dan kesenian yang secara berkesinambungan merawat nilai-nilai luhur masyarakat Gowa-Makassar, utamanya dalam

dimensi kesetiaan baik sebagai individu otonom maupun secara sosial. Lebih jauh, perubahan fungsi ritual *angngaru* ke dalam bentuk pertunjukan populer memungkinkan tradisi tersebut untuk dapat dinikmati dan dimaknai lebih kompleks oleh masyarakat yang lebih jamak. Perubahan dalam dimensi bentuk ritual tersebut, juga dapat menegaskan keberterimaan masyarakat Gowa-Makassar terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat tanpa mengurangi nilai-nilai yang subtil dari tradisi tersebut.



Gambar 2. Dg. Tutu *angngaru* dalam penjemputan tamu kehormatan/pejabat negara.
Sumber: Koleksi pribadi Dg. Tutu

PENUTUP

Hasil elaborasi mengenai tradisi lisan *angngaru* di atas, ditarik sebuah simpul argumen bahwa *angngaru* sebagai sebuah ritual sakral telah mengalami perubahan fungsi menjadi budaya pertunjukan populer. Perubahan ini disebabkan oleh bergesernya berbagai dimensi kehidupan masyarakat Makassar. Dari segi pemerintahan, Gowa-Makassar tidak lagi berupa kerajaan yang membutuhkan prajurit untuk bersumpah dalam medan peperangan. Dimensi perubahan sosial budaya masyarakat Makassar yang disebabkan oleh globalisasi juga turut andil dalam proses perubahan fungsi ritual tersebut. Leburnya batas-batas wilayah yang melahirkan interaksi lintas-batas (masyarakat kosmopolitan) memicu pergeseran yang radikal dari tradisi *angngaru*. Kebutuhan ekonomi yang kini bertambah kompleks menuntut pelaku-pelaku

tradisi bersiasat dengan perubahan zaman sehingga tradisi *angngaru* kemudian dipertahankan mengikuti pola pertunjukan populer. Namun demikian, faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran fungsi tradisi ritual *angngaru* tersebut menjadi sebuah penggambaran mengenai proses preservasi dan pewarisan tradisi ke dalam bentuk yang lebih adaptif. Pergeseran tersebut juga selayaknya dimaknai sebagai proses perdebatan dan agenda kerja kebudayaan yang terus berdinamika dalam menjawab tantangan zaman.

Akhirnya, pembahasan mengenai perubahan fungsi ritual dapat dijadikan suatu bentuk refleksifitas mengenai nilai-nilai kebudayaan lokal yang tetap dipertahankan meskipun mengalami komodifikasi di era globalisasi saat ini. Komodifikasi kebudayaan tersebut tidak melulu dimaknai sebagai bentuk kapitalisasi terhadap produk budaya tradisional, tetapi sebuah strategi pelestarian yang terus berlanjut. Selayaknya warisan, produk budaya tradisi lisan sudah harus mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat modern yang penuh dengan ancaman kebudayaan global. Menjadikan tradisi lisan sebagai bagian dari kebudayaan global merupakan pilihan yang bijak, agar generasi selanjutnya masih dapat menyaksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang ‘menubuh’ (*embodied*) dalam kebudayaan masyarakatnya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar : Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abrams, Lynn. 2016. *Oral History Theory*.
- Bauman, Richard. 1977. *Verbal Art as Performance*. Prospect Heights: Waveland.
- Cummings, William. 2015. *Penciptaan Sejarah Makassar di Awal Era Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Djirong Basang, and Salmah Djirong Daeng. Intang. 1997. *Taman Sastra Makassar*. [Ujung Pandang]: Dirjen Depdikbud.
- Hamid, Pananrangi., Tatiek. Kartikasari, S. Sumardi, and Sri Mintosih. 1992. *Lontara Tellumpoccoe*. [Jakarta]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Hobsbawm, E. J. 2019. *The Invention of Tradition*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Lathief, Halilintar, and Niniek Sumiani HL. 2000. *Tari Daerah Bugis (Tinjauan Melalui Bentuk Dan Fungsi)*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.
- Massiara, H. A. 1988. *Menyingkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.
- Mattulada. 1985. *Latoa, Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murgianto. 2004. *Tradisi Dan Inovasi: Beberapa Masalah Di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widiasastra.
- Paeni, Mukhlis., Edward L. Poelinggomang, and Ina. Mirawati. 2002. “Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar.”
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1972. “Sedjarah Gowa.”
- Sikki, Muhammad., and Nasruddin. 1995. “Puisi-puisi Makassar.”
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogya: PT. Tiara Wacana.
- Syahrial, Dr. 2016. “Tradisi Lisan Kias Dalam Masyarakat Lampung Peminggir Kalianda: Bentuk, Fungsi, Dan Konteks.” Universitas Indonesia.

Sumber Lisan/Informan:

H. Syarifuddin Dg. Tutu (64 tahun). 2019